BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, telah mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Dalam konteks organisasi pemerintah, pengertian akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja *financial* pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Sedangkan menurut Standbury (2003) dalam Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pembuatan laporan keuangan itu merupakan suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Sebagai salah satu pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan. Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja *financial* di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholders*).

Untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu memiliki karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Laporan keuangan juga merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pemerintah saat ini wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang mempunyai nilai bagi para pemakai atau pengguna (Suwardjono, 2005). Informasi harus memiliki karakteristik tertentu yaitu relevan, tepat waktu, akurat dan lengkap. Dengan adanya informasi yang jelas serta kongkrit maka

pemberi informasi dan kinerja *financial* pemerintah dapat mencapai tujuannya yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Dalam laporan keuangan faktanya masih disajikan data yang kurang memadai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak pihak yang menyajikan data tidak sesuai dan tidak dipertanggungjawabkan secara benar. Seperti tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Anwar Nasution (2007) menilai laporan keuangan Pemerintah Daerah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Anwar Nasution menyebutkan, permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Selain itu Anwar Nasution juga menyatakan ada beberapa kelemahan dalam sistem keuangan negara Indonesia di era orde baru yaitu: (1) kelemahan dalam desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, (2) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (3) penyimpanan keuangan negara yang semrawut, (4) tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara dan (5) pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai.

Berdasarkan fakta lain yang diperoleh di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS II tahun 2011) ternyata masih ditemukannya kelemahan dalam menyusun laporan keuangan. Diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah terutama berkenaan dengan

sistem pengendalian antara lain berupa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan tersebut menunjukkan tren peningkatan pada setiap semesternya sejak tahun 2009. Dari ketiga kondisi tersebut, kelemahan di dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan memberikan kontribusi tertinggi bagi laporan keuangan pemerintah yang buruk.

Hal ini merupakan problem besar bagi pemerintah daerah. Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi resiko dan analisis resiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tidak tepat waktu. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

Oleh karena itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah melakukan koreksi secara menyeluruh. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.

Standar ini dibutuhkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang terkait dalam pasal 56 ayat (4) UU Nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap kepada SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan atas pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan. Peran sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atau kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang ada. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi, prosedur pencatatan, dokumen, formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, laporan dan pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut juga dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan dan hak-hak dalam melakukan pekerjaan.

Faktor lain pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan

pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik pula. Ketiga aspek tersebut harus berpadu dan berkesinambungan sebagai suatu sistem pelaporan yang baik. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya.

Sebuah informasi di dalam laporan keuangan sangat bermanfaat bagi penggunaannya. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik maka suatu organisasi harus mempunyai sistem informasi yang baik pula. Sistem informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan sistem informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang baik disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagian yang bersangkutan seperti bagian akuntansi diuntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Apabila semua faktor telah dipertimbangkan maka manajemen mempunyai resiko dan kesalahan yang relatif kecil terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya hubungan antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern di harapkan dapat membantu memperoleh kualitas laporan keuangan pemerintah yang lebih baik dan berkualitas andal. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Faishol (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan). Demikian

juga penelitian Tuti Herawati (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur).

Dari beberapa pernyataan diatas, masih sedikitnya penelitian mengenai hal tersebut sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini ada penambahan variabel independen yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi secara umum telah diketahui manfaatnya yaitu untuk mempermudah hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi, dapat menyingkat waktu dan memperbesar keakuratan analisis akuntansi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian dalam penelitian ini berjudul “PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH” (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Blora Jawa Tengah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan pemerintah itu sendiri tidak akan bermanfaat jika tidak disajikan tepat waktu, oleh sebab itu sebagai jaminan maka dibutuhkan penyampaian dan penyajian secara tepat waktu. Kualitas informasi dalam

pembuatan laporan keuangan juga harus diperhatikan, pemerintah wajib mencari informasi yang harus memiliki karakteristik tertentu yaitu relevan, tepat waktu, akurat dan lengkap. Tidak hanya itu saja, sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern juga sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Dengan adanya informasi yang jelas serta kongkrit maka pemberi informasi dan kinerja finansial pemerintah dapat mencapai tujuannya yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang andal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 2) Bagaimana sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan untuk mengetahui penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2) Bagi Teoritis

Sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan daerah sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dalam aplikasi dilapangan. Dapat juga digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian dengan tema yang sama dimasa yang akan datang.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Untuk memberikan masukan mengenai masalah-masalah yang ada dan memberikan kebijakan yang efektif dan efisien berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.